



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA

BULETIN EDISI XIV

13 - 17 APRIL 2026





PERKUAT PECEGAHAN TPPO/TPPM, KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA GELAR SOSIALISASI PINTAR



KONAWA SELATAN – Kantor Wilayah Kementerian Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk "Paspor Indonesia, Nyaman, Terjamin, Aman, Resmi dalam upaya pencegahan TPPO/TPPM". Kegiatan yang berlangsung di Hotel Wonua Monapa, Konawe Selatan ini bertujuan untuk menyinergikan persepsi aparat daerah dalam menjaga kedaulatan negara melalui instrumen dokumen perjalanan.

Sinergi Lintas Sektoral demi Keamanan Negara

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sultra, Ganda Samosir. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa paspor bukan sekadar dokumen perjalanan biasa, melainkan representasi identitas kedaulatan yang harus dijaga dari potensi penyalahgunaan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab.

"Paspor adalah pintu gerbang. Melalui perspektif intelijen, kita diajak untuk lebih peka terhadap setiap potensi ancaman, baik itu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), hingga ancaman ideologi transnasional," ujar Ganda Samosir saat membuka acara.

Menghadirkan narasumber utama, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tenggara, materi sosialisasi fokus pada deteksi dini dan cegah dini. Dalam paparannya, Kabinda menguraikan bagaimana data keimigrasian menjadi instrumen vital dalam pemetaan kerawanan keamanan nasional. Ia menekankan pentingnya verifikasi faktual sejak tingkat desa agar dokumen negara tidak jatuh ke tangan yang salah.



Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan strategis di wilayah Konawe Selatan guna memastikan pengawasan yang komprehensif dari hulu ke hilir:

- Unsur Pemerintah Daerah: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Konawe Selatan.
- Unsur Keagamaan: Kepala Kantor Kemenag dan Kepala Kantor Urusan Haji, guna memantau pergerakan jamaah dan umrah.
- Aparat Terdepan: Para Camat, Lurah, hingga Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan.

Ujung Tombak di Tingkat Desa

Keterlibatan Kepala Desa dan Lurah dalam sosialisasi ini dinilai sangat krusial. Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan domisili warga, mereka adalah filter pertama dalam proses validasi administrasi sebelum seseorang mengajukan permohonan paspor. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan terbangun komunikasi yang solid antara instansi intelijen, imigrasi, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan wilayah Sulawesi Tenggara yang aman dan tertib administrasi keimigrasian.

SATU VISI, SATU AKSI: KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA PERLUAS EKOSISTEM KEMANDIRIAN PANGAN!



KENDARI – Kepala Kantor Wilayah | Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari dan Lapas Perempuan Kendari. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung keberhasilan program pembinaan warga binaan yang kini menjadi pilar utama dalam mendukung Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan mengenai Kemandirian Pangan.

Optimalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Dalam peninjauan tersebut, Kakanwil melihat secara dekat progres kebun hidroponik (pertanian) serta potensi pengembangan di sektor perikanan dan peternakan yang dikelola secara mandiri oleh warga binaan. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan di dalam institusi.

"Kemandirian pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi soal kemampuan kita untuk memproduksi sendiri. Apa yang dilakukan di Lapas Kendari melalui sektor pertanian dan perikanan ini adalah langkah nyata menuju kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri," ujar Kakanwil.



Instruksi Replikasi di Lingkungan Kanwil

Terinspirasi dari keberhasilan integrasi berbagai sektor pangan di Lapas, Kakanwil menginstruksikan jajaran di Kantor Wilayah untuk segera memulai langkah serupa. Kanwil berencana mengoptimalkan lahan yang ada untuk mengembangkan unit percontohan pertanian perkotaan dan perikanan skala mandiri.

"Kami tidak ingin hanya sekedar meninjau, namun juga memberikan aksi nyata. Kantor Wilayah akan segera mereplikasi model ini, baik dalam bentuk pertanian hidroponik maupun budidaya perikanan darat. Ini adalah komitmen kami untuk menjadikan lingkungan kantor sebagai area yang produktif dan mandiri secara pangan," tambah beliau.

Sinergi Membangun Kemandirian

Kakanwil menekankan bahwa integrasi antara sektor pertanian (hidroponik), perikanan, dan peternakan merupakan kunci utama dalam mencapai swasembada pangan di lingkungan kementerian. Melalui replikasi program ini di tingkat Kanwil, diharapkan muncul kesadaran kolektif untuk terus berinovasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia.



Kegiatan kunjungan ini diakhiri dengan diskusi bersama tim teknis mengenai pengelolaan nutrisi tanaman dan metode budidaya ikan yang efisien, yang akan dijadikan rujukan awal dalam pembangunan fasilitas serupa di Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara.

PERKUAT PENGAWASAN KEIMIGRASIAN, IMIGRASI SULTRA KOORDINASI DESA BINAAN IMIGRASI DI BUTON TENGAH



BUTON TENGAH – Dalam upaya preventif menekan angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan koordinasi Desa Binaan Imigrasi di wilayah Kabupaten Buton Tengah, khususnya di Kecamatan Mawasangka Tengah, pada 12 hingga 15 April 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Bapak Heru Hartono, selaku Ketua Tim, dengan melibatkan anggota tim dari Kantor Wilayah serta Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau.

Edukasi dan Mitigasi di Desa Lanto

Mengawali agenda pada Senin (13/04), tim menyambangi Desa Lanto untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa. Fokus utama koordinasi ini adalah memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab PIMPASA sebagai garda terdepan imigrasi di tingkat desa.

Ketua Tim, Heru Hartono, menekankan pentingnya peran PIMPASA dalam memberikan edukasi mengenai prosedur pembuatan paspor yang benar serta risiko bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Lanto mengapresiasi program ini.

"Dengan adanya Desa Binaan Imigrasi, masyarakat kami mendapatkan edukasi hukum yang sangat dibutuhkan untuk mencegah TPPO/TPPM dan meningkatkan perlindungan bagi warga yang ingin bekerja ke luar negeri," ujarnya.

Pantau Kerawanan Jalur Perairan di Waturembe Bata

Perjalanan berlanjut ke Desa Waturembe Bata. Mengingat lokasinya yang berada di pesisir, pihak desa mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi aktivitas gelap di sekitar perairan desa. Meski saat ini belum terdeteksi adanya pelanggaran keimigrasian, pihak Desa Waturembe Bata berharap PIMPASA dapat melakukan pengawasan lapangan secara intensif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Urgensi Literasi Hukum di Desa Lakorua

Pada Selasa (14/04), tim mengunjungi Desa Lakorua. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa pengetahuan masyarakat setempat mengenai hukum keimigrasian masih tergolong minim. Pihak desa menyambut baik kehadiran tim dan berharap edukasi keimigrasian dapat dilakukan secara berkala guna membentengi masyarakat dari bujuk rayu sindikat TPPO.

Evaluasi dan Komitmen Berkelanjutan

Menutup rangkaian kegiatan, tim melakukan rapat evaluasi di Baubau sebelum bertolak kembali ke Kendari pada Rabu (15/04). Hasil dari koordinasi lapangan ini akan dilaporkan secara resmi kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Melalui program Desa Binaan Imigrasi dan peran aktif PIMPASA, Kanwil Imigrasi Sultra berkomitmen untuk terus menghadirkan negara di tengah masyarakat, memastikan pelayanan prima, serta pengawasan yang ketat demi terciptanya keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara.

MEMPERKUAT PENGAWASAN, KANWIL DITJENIM SULTRA GELAR KOORDINASI IZIN TINGGAL DI KABUPATEN KOLAKA

KOLAKA – Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, melaksanakan kegiatan koordinasi lapangan terkait dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian di wilayah Kabupaten Kolaka. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 16 hingga 18 April 2026, ini bertujuan untuk memastikan validitas data orang asing serta kepatuhan terhadap regulasi keimigrasian yang berlaku.



Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya proaktif Kanwil Ditjenim Sultra dalam memetakan keberadaan warga negara asing (WNA) serta memberikan edukasi mengenai prosedur izin tinggal, khususnya yang berkaitan dengan dinamika sosial di daerah.

Sinergi Lintas Instansi: Fokus pada Perkawinan Campur

Dalam pelaksanaannya, Tim melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Kolaka. Salah satu titik fokus koordinasi adalah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Langkah ini dinilai strategis karena KUA memiliki data rincian mengenai fenomena perkawinan campur (perkawinan antara WNI dan WNA) di wilayah Kolaka. Informasi tersebut sangat krusial bagi Imigrasi guna memastikan status hukum izin tinggal para pelaku kawin campur tersebut agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Koordinasi dengan KUA memberikan kami gambaran riil di lapangan mengenai sebaran pelaku perkawinan campur, sehingga kita bisa melakukan jemput bola dalam memberikan pelayanan maupun pengawasan izin tinggal," ujar perwakilan tim koordinasi.

Akurasi Data Bersama Disdukcapil

Selain KUA, tim juga mengunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kolaka. Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi data administrasi kependudukan. Hal ini mencakup pemutakhiran data bagi WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang wajib memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el bagi orang asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi pemegang ITAS.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara instansi pusat dan daerah. Muaranya adalah terciptanya ketertiban administrasi serta penguatan pengawasan orang asing yang humanis namun tetap tegas di wilayah Bumi Mekongga.





TINDAK TEGAS PELANGGARAN KEIMIGRASIAN, KANWIL DITJENIM SULTRA DAMPINGI PENDEPORTASIAN 5 WNA ASAL VIETNAM

KENDARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum keimigrasian di wilayah Bumi Anoa. Pada hari ini, Kamis, 16 April 2026, Kanwil Ditjenim Sultra melakukan pendampingan langsung terhadap proses pendeportasian 5 (lima) warga negara asing (WNA) berkebangsaan Vietnam.

Kelima WNA tersebut sebelumnya diamankan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka dinyatakan terbukti melanggar ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai sanksi administratif keimigrasian, otoritas mengambil tindakan tegas berupa pengusiran atau deportasi ke negara asal.

Proses pendeportasian dilaksanakan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, sebagai titik keberangkatan internasional. Kehadiran tim pendamping dari Kantor Wilayah bertujuan untuk memastikan seluruh prosedur keberangkatan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan aspek keamanan tetap terjaga hingga para WNA tersebut meninggalkan wilayah kedaulatan NKRI.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk pengawasan preventif dan represif terhadap keberadaan orang asing. Imigrasi tidak akan segan untuk mengambil tindakan hukum bagi siapa saja WNA yang tidak menghormati hukum dan mengganggu ketertiban di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dengan terlaksananya deportasi ini, diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Baubau.

PENGUATAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN OLEH TIM KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI TENGGARA DI KOTA BAUBAU

Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan koordinasi dan kunjungan lapangan pada tiga lokasi, yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau, Kelurahan Batulo, dan Kelurahan Wale, Kota Baubau.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian serta mencegah potensi pelanggaran oleh Warga Negara Asing (WNA). Melalui koordinasi yang dilakukan, diharapkan terbangun sinergi yang baik antara instansi terkait, aparatur wilayah, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan orang asing di wilayah.



Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mengidentifikasi potensi kerawanan serta mendorong upaya pencegahan secara dini, termasuk terhadap praktik non-prosedural yang melibatkan Warga Negara Indonesia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sistem pengawasan keimigrasian yang lebih terintegrasi, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat guna menjaga ketertiban serta kedaulatan negara.

KOORDINASI DAN EVALUASI INTERNAL OLEH TIM KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI TENGGARA



Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau dalam rangka koordinasi dan evaluasi internal.

Pembahasan meliputi evaluasi dan pelaporan kepatuhan internal, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta rencana pelaksanaan deportasi Warga Negara Asing (WNA) ke Vietnam sebagai bagian dari tindakan administratif keimigrasian. Selain itu, turut dibahas rencana pengadaan kendaraan dinas guna mendukung operasional pelayanan dan pengawasan.



Dalam pengelolaan BMN, ditegaskan bahwa setiap proses transfer wajib memperoleh persetujuan Kepala Kantor Wilayah sebagai bentuk pengendalian dan tertib administrasi aset. Satuan kerja juga didorong untuk berperan aktif dalam pemeliharaan dan pemenuhan sarana prasarana.



Turut dibahas kebutuhan tambahan perangkat komputer untuk mendukung operasional, termasuk pada Lapas Kendari, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan dan perencanaan anggaran BMN berdasarkan skala prioritas.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset serta mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian.

DUKUNG INVESTASI, IMIGRASI SULTRA GENCARKAN SOSIALISASI GOLDEN VISA!

Bertempat di Kabupaten Konawe, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari melaksanakan kegiatan Sosialisasi Golden Visa yang secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat iklim investasi di Sulawesi Tenggara melalui pengenalan kebijakan Golden Visa kepada para pemangku kepentingan di daerah. Melalui kebijakan ini, Warga Negara Asing (WNA) berkualitas diberikan kemudahan izin tinggal dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun, sebagai upaya menarik investor yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Konawe.



Dalam sambutannya, Ganda Samosir menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam mendukung implementasi kebijakan Golden Visa agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antara Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, serta instansi terkait lainnya.

"Golden Visa hadir sebagai kebijakan strategis untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah."



PERKUAT PENGAWASAN WILAYAH, KAKANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA IKUTI RAPAT KOMITE INTELIJEN DAERAH



Kakanwil Ditjen Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menghadiri rapat koordinasi bersama Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertemuan ini merupakan langkah krusial dalam memperkuat sinergitas intelijen antar-instansi demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sultra.

Fokus utama dalam koordinasi ini adalah penguatan deteksi dini dan pertukaran informasi strategis terkait pengawasan orang asing untuk memastikan kedaulatan negara tetap terjaga di Bumi Sultra.

